



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PALU
 Jl. Samratulangi Palu KOTA PALU
 SULAWESI TENGAH
<http://pn-palu.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
4,00 / 100,00%

Jumlah	44 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 26	
	PEREMPUAN : 18	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0	
	SD : 0	Diploma 3 : 1
	SMP : 0	S1 : 23
	SMU : 12	S2 : 8
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 10	SWASTA : 4
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 3
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 1
	LAINNYA : 25	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	4,000
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?

- Pengadilan Negeri Palu telah melakukan publikasi terkait informasi biaya pelayanan di Pengadilan di website pengadilan, banner panjar biaya perkara di area PTSP yang mudah dijangkau oleh pengguna layanan. Selain itu, para pengguna layanan dapat bertanya secara langsung.

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

- Pengadilan Negeri Palu meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal. termasuk evaluasi berkala terhadap integritas hakim dan aparatur peradilan. Selain itu, dilakukan penguatan implementasi kode etik dan pedoman perilaku aparatur, serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggaran yang terbukti melalui mekanisme pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

- Pengadilan Negeri Palu menegaskan bawah praktek menjual pengaruh di pengadilan dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara yang ada di pengadilan sudah tidak terjadi. Serta himbauan anti gratifikasi berdasarkan lampiran SEMA No. 17 Tahun 2019 yang terpampang nyata di ruangan PTSP dan disampaikan melalui sound dapat terdengar disetiap ruangan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

22 Oktober 2025
 Ketua Pengadilan Negeri